Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (KONMASPI)
Volume 3, Oktober 2026
The article is published with Open Access at: https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/konmaspi

Proyek Uni Arab Nazim al-Qudsi 1951 sebagai Strategi Menghadapi Ekspansi Israel di Timur Tengah

Restu Dimas Prasetya
UIN Sunan Ampel Surabaya
sadewaeril@gmail.com
Muzaiyana
UIN Sunan Ampel Surabaya
muzaiyana@uinsa.ac.id

Abstrak: Since the Arab-Israeli War and the Nakba of 1948, the State of Israel has occupied Palestinian coastal territories seized during the conflict—a situation confronted by neighboring Arab states through either military strategy or diplomacy. One such state was Syria; in 1951, Prime Minister Nazim al-Qudsi adopted a strategy of Arab unification to counter this threat. This study examines the Arab Union project proposed by Nazim al-Qudsi as a strategy against external threats and analyzes the reasons for its failure. The research employs the historical method, comprising heuristics, criticism (verification), interpretation, and historiography. The findings indicate that: 1) Nazim al-Qudsi initiated the project in 1947—while serving as a founder of the People's Party in Aleppo—through an unsuccessful attempt to unify Syria and Iraq; 2) Following Israel's establishment in 1948 and its seizure of most Palestinian territory, Syria engaged in military conflict with Israel, culminating in the 1948 Arab-Israeli War; 3) In 1951, while serving as Prime Minister, Nazim al-Qudsi expanded the Syria-Iraq unification initiative into a broader project to unite Arab nations against Israel; and 4) The project failed due to Syria's instability and a lack of governmental cohesion, evidenced by a series of coups: Husni al-Zaim's coup in 1949, followed by coups led by Sami al-Hinnawi and Adib al-Shishakli that same year, and a second coup by al-Shishakli in 1951.

Kata Kunci: *Arab Union, Nazim al-Qudsi, Syria, Israel, Arab.*

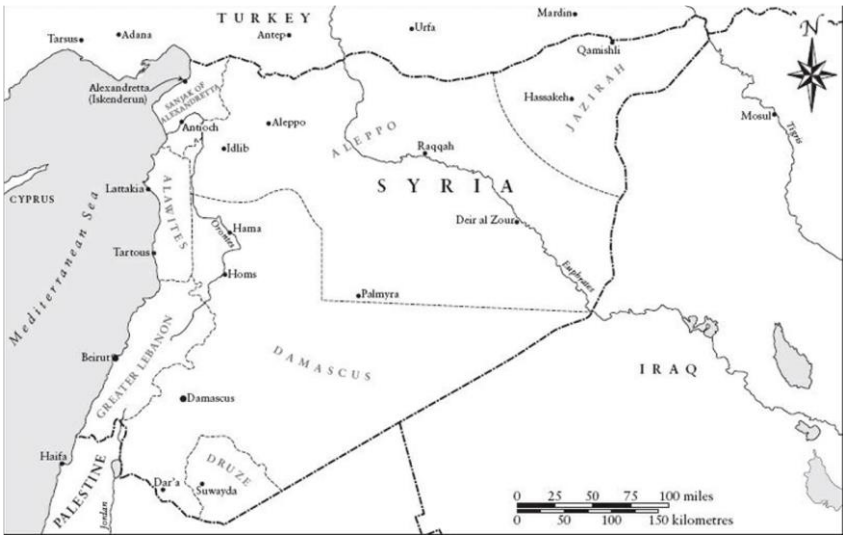
PENDAHULUAN

Kondisi Syam (Suriah, Libanon, Yordania, dan Palestina) di abad ke 20 M, pasca melemahnya Khilafah Utsmani menjadi pintu masuk bagi Kolonialisme Israel di Palestina. Pasalnya, ketika itu, wilayah Syam sedang terbagi-bagi diantara Penjajah Kolonial Inggris dan Prancis.Khilafah Utsmani mengalami kekalahan dalam Perang Dunia I 1914-1918 M setelah bertempur melawan pasukan sekutu (Inggris, Prancis, Rusia, dan lainnya) di banyak front: Kaukasus, Dardanella, Palestina, Sinai, dan lainnya. Pada 1916 M pula, terjadi pemberontakan Arab yang dipimpin Syarif Husain, penguasa

Makkah pada Turki Utsmani yang didukung sekutu . Wilayah -wilayah Arab yang dikuasai Turki Utsmani beralih ke tangan sekutu. Suriah dikuasai Prancis, dan Palestina dikuasai Inggris (Tim Riset dan Studi Islam Mesir, 2019, hal.295-296 dan Maksudoglu, 2023, hal.352-356).

Suriah, sempat menjadi negara merdeka dalam waktu yang singkat. Selama 1917-1918, gelombang Revolusi Arab menjangkau Suriah yang berada dibawah kekuasaan Turki Utsmani. Pasukan Revolusi Arab menguasai Suriah, dan Faisal, putra Syarif Husain dinobatkan sebagai Raja Suriah pada 1920 M. Namun, itu bukan tanpa syarat, Prancis ingin ikut campur dengan mengurangi jumlah Tentara Suriah dan kontrol rel kereta api di tengan Prancis. Dalam konferensi San Remo 1920, disepakati, Suriah berada di bawah Mandat Prancis dan Palestina dibawah Mandat Inggris. Hal itu disetujui Raja Faisal . Pasukan Prancis bergerak ke Damaskus pada Desember 1920, dihadang Pasukan Suriah yang dipimpin Menteri Pertahanan Yusuf al-Azma. Pasukan Prancis mengalahkan mereka dalam Pertempuran Khan Maysalun . Dalam pertempuran ini, Al-Azma gugur dan Suriah jatuh ke tangan Prancis (MC.Hugo, 2015, hal.57-68)

Sementara itu, Suriah dipecah belah. Prancis membagi Suriah menjadi negara-negara kecil .Yaitu Negara Damaskus, Negara Jazirah, Negara Aleppo, Negara Libanon, Negara Jabal Druze, dan Sanjak Aleksandretta (MC.Hugo, 2015, hal.80).



Gambar 1: Peta pembagian Suriah era Mandat Prancis 1920-1946(MC.Hugo, 2015, hal.80).

Hal tersebut, memicu perlawanan dari Rakyat Suriah. Antara lain pemberontakan seorang perwira Kurdi dari pasukan Raja Faisal, Ibrahim Hananu yang telah dipersiapkan

sejak 1919 M, sebelum Prancis betul-betul menguasai Suriah dan masih melakukan perebutan terhadap pesisir Suriah. Pemberontakan Hananu bergolak 1920-1921 M dan mendapat dukungan dari Mustafa Kemal Ataturk yang saat itu masih menjadi Panglima Turki Utsmani . Pada November 1920, Pasukan Ibrahim Hananu berhasil merebut Harim dan Jisr al-Shagur . Operasi pasukan Hananu terus berlanjut pada musim semi 1921. Saat pasukannya kalah, Hananu kabur ke Yerusalem dan tertangkap oleh Mandat Inggris, kemudian dipulangkan ke Suriah untuk diadili Mandat Prancis (Abdil Barr, 2024, hal.439, Khoury, 1987, hal.105-110).

Pasukan Mustafa Kemal yang tengah berperang melawan Prancis di Kilikia dan Anatolia Selatan, membantu Hananu dengan suplai dan bantuan militer hingga 1921. Mustafa Kemal juga membantu pemberontakan Kaum Syiah Alawi terhadap Mandat Prancis dan dipimpin oleh Syaikh Salih al-Ali yang juga berlangsung antara 1919-1920 M. Dua pemberontakan ini mengalami kegagalan karena terhentinya bantuan militer Turki setelah negosiasi Turki-Prancis pada 1920 M (Halabi, 2012, hal.26 dan Khoury, 1987, hal.100-102 dan 111).

Puncaknya, pada 1925-27, pecah perlawanan besar-besaran Rakyat Suriah terhadap Mandat Prancis yang disebut Revolusi Besar Suriah atau *Great Syrian Revolt.* Komunitas Druze di Hawran dan Suwayda yang dipimpin Sultan al-Atrash, begitu juga para pejuang di Hama, Ghouta, kaum Kristen Maronit di Libanon, dan Damaskus melakukan perlawanan bersenjata terhadap Mandat Prancis. Yang belum berhasil pula memerdekakan Suriah dari penjajahan (Hugo, 2015, hal.85-91 dan Khoury, 1987, hal.VII).

Sementara Suriah sedang dalam keadaan terjajah, Inggris di Palestina mendukung migrasi Yahudi besar-besaran yang kelak menjadi cikal bakal negara Israel. Pada 1928 M, hal itu mendapat reaksi cukup keras dari seorang Ulama Suriah yang tinggal di Haifa, Palestina, yaitu Izzuddin al-Qassam, yang dalam khutbahnya menyampaikan bahwa para imigran tersebut berpotensi merebut Palestina suatu saat kelak (Abdil Barr, 2024, hal.510-513).

Nazim al-Qudsi (1906-1998 M) , lahir dan berkembang di tengah-tengah situasi genting ini. Ia merupakan salah satu politikus Suriah yang berperan penting dalam sejarah politik di negeri tersebut. Ia lahir pada 1906 atau dalam sumber lain, 1900 di Aleppo, Suriah . Gelar sarjananya, ia peroleh dari Universitas Damaskus, Universitas Amerika Beirut, dan Universitas Jenewa, Swiss (Moubayed, 2006, hal.304 dan Abu Shaqra).

Nazim juga merupakan Duta besar Suriah pertama untuk Amerika Serikat. Presiden Suriah Syukri al-Quwatli, menunjuknya sebagai Duta besar Suriah untuk Amerika Serikat pada tahun 1945 M. Ia mendirikan Kedutaan besar Suriah pertama di Amerika Serikat serta menyerahkan surat kepercayaan pada Presiden Amerika Serikat Franklin Rooselvet (Moubayed, 2006, hal.304).

Ia juga berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan Suriah melawan Penjajahan Prancis. Pada 1935 M, ia kembali ke Suriah setelah kuliah di Jenewa, lalu bergabung dengan salah satu Organisasi Pergerakan Nasional Suriah, National Bloc/ blok nasional . Ia menjadi anggota parlemen blok pada 1936 M. Tak lama kemudian, di tahun 1939 M, ia mundur dari parlemen blok karena perselisihan pasca aneksasi Turki atas salah satu wilayah Suriah, Aleksandretta di tahun yang sama (Moubayed, 2006, hal.304).

Pada 17 April 1946 M, Suriah resmi meraih kemerdekaan dari Penjajahan Prancis. Setelah demonstrasi di Beirut, Damaskus, dan wilayah lainnya yang berada di bawah Penjajahan Prancis. Pada 17 April 1946, Prancis akhirnya menarik pasukannya dari Suriah sepanjang musim dingin 1945-1946 M , juga menarik pasukannya dari wilayah jajahannya di Libanon pada Agustus 1946 (Khoury, 1987, hal.616-617 dan Syrian Memories, 2023).

Tak lama setelah kemerdekaan Suriah, 1947 , Nazim al-Qudsi bersama sahabatnya, Rushdi al-Kikhiya, mendirikan Partai Rakyat yang berbasis di kota kelahirannya, Aleppo. Partai ini, menjadi oposisi terhadap pemerintahan Al-Quwwatli. Al-Quwwatli sendiri, didukung oleh Partai Nasional. Di tahun yang sama pula, Nazim menjadi anggota Parlemen Suriah (Moubayed, 2006, hal.304-305).

Saat itulah, Nazim sebagai pendiri Partai Rakyat mulai memikirkan gagasan menyatukan Suriah dengan Irak yang dipimpin Dinasti Hasyimi (Moubayed, 2006, hal.305). Gagasan ini kelak berkembang menjadi Proyek Uni Arab yang bertujuan menyatukan seluruh negara Arab menjadi satu federasi untuk menghadapi Penjajahan Israel di Palestina pada 1951 M.

Penelitian ini, menggunakan teori Antonio Gramsci, bahwa penguasa tidak memerintah dengan kekerasan, tetapi juga dengan persuasi atau pengaruh (Burke, 2015, hal.128-129) . Sebagaimana Nazim al-Qudsi pada pertemuan Liga Arab 1951 M, menggunakan pengaruhnya sebagai Perdana Menteri Suriah, untuk menyatakan ide

pembentukan negara Persatuan Arab yang terdiri dari Suriah, Yordania, Saudi Arabia, Yaman, dan lain lain.

Adapun, metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah yang terdiri dari heuristik atau pengumpulan sumber, baik sumber sekunder maupun sumber primer, verifikasi atau kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Abdurrahman 2015, hal.104).

Heuristik, dilakukan dengan mengumpulkan semua sumber yang dibutuhkan, baik sumber primer atau sumber yang ditulis oleh saksi mata, maupun sumber sekunder, atau sumber yang tidak ditulis oleh saksi mata. Sumber primer, misalnya tulisan Nazim al-Qudsi tentang proyek Uni Arabnya yang berjudul Arab Federal Union Proposal , sumber primer lainnya adalah surat kabar *The New York Times* pada 1951 yang mengabarkan hal tersebut, sebagai contoh. Surat kabar yang berjudul *Arab States is Proposed to Fight Zionist Threat dan* dirilis pada 26 Januari 1951, mengabarkan bagaimana Nazim al-Qudsi mendeklarasikan proyek tersebut pada KTT Liga Arab yang diselenggarakan di Kairo, Mesir (Abdurrahman, 2015, hal.105, Qudsi, 1951, dan *The New York Times,* 1951). Sumber sekunder, meliputi buku, jurnal, maupun artikel yang relevan.

Setelah itu ada kritik atau verifikasi. Sumber dipastikan keasliannya. Untuk arsip dan surat kabar sezaman, saya mengambil dari website arsip Presiden Nazim al-Qudsi yang dikelola komite keluarganya Presidential Library of Dr. Nazem al-Koudsi, adapun kesahihan isi sumber, dilakukan perbandingan dengan sumber lain. Contoh, proposal Nazim al-Qudsi tentang proyek Uni Arab, dibandingkan dengan surat kabar *The New York Times* yang sezaman dengan peristiwa untuk dipastikan, bagaimana sebetulnya isi proyek tersebut dan bagaimana pandangan pihak luar terhadap proyek tersebut (Abdurrahman, 2015, hal.110-111).

Dilanjutkan dengan interpretasi atau analisis fakta sejarah, yaitu menafsirkan dan menganalisis seluruh fakta yang telah didapat dengan teori yang digunakan dalam penelitian, barulah kemudian historiografi atau penulisan hasil penelitian sejarah yang didapat dalam bentuk laporan penelitian (Abdurrahman, 2015, hal.114-117).

Penelitian ini, bertujuan mengungkap sejarah dan tujuan proyek Uni Arab 1951 , dan halangan yang diterima dari proyek tersebut. Signifikansi penelitian ini, adalah mengkaji salah satu upaya bersejarah untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel yang masih menjadi salah satu masalah kemanusiaan terbesar di abad ini, sehingga dapat

menjadi pertimbangan untuk pemutusan kebijakan yang lebih baik di masa depan. Belum ada penelitian yang membahas secara khusus tentang proyek ini.

Namun, biografi Nazim al-Qudsi dan sepintas tentang proyek ini, telah dibahas dalam beberapa karya ensiklopedis yang membahas Sejarah Suriah, diantaranya:

1.*Steel and Silk: Men and Women Who Shaped Syria in 1900 -2000*, karya sejarawan besar Suriah Sami Moubayed (2006). Buku ini adalah kumpulan biografi tokoh-tokoh terkemuka dari Suriah abad ke 20 M. Dalam buku tersebut, Sami Moubayed menjelaskan secara ringkas tentang Nazim al-Qudsi dan proyek uni Arabnya. Termasuk perjuangannya sebagai anggota blok nasional pada 1935-1945. Dubes Suriah untuk AS pertama pada 1945, pendiri Partai Rakyat dan anggota parlemen pada 1947, Menteri luar negeri pada 1949, Perdana Menteri pada 1951, kepala parlemen pada 1954-1957, hingga masa kepresidenan pada 1961-1963 dan berakhirnya kekuasaannya saat digulingkan Partai Baath dan wafatnya pada 1998 M. Moubayed sempat membahas proyek Uni Arab pada 1951, tetapi tidak detail dan hanya 1 paragraf (Moubayed, 2006, hal.304-308).

2.*Historical Dictionary of Syria* karya David W.Lesch dan David Commins (2014) Sebuah kamus tentang nama tokoh, tempat, peristiwa, dan lainnya dalam Sejarah Suriah. Salah satu entrinya membahas biografi Nazim al-Qudsi , dengan isi yang kurang lebih sama dengan Moubayed. Hanya berbeda tahun saja soal kelahiran Nazim. Moubayed menulis 1900 , Lesch dan Commins menulis 1906 Tanpa membahas proyek Uni Arab 1951. Sehingga melewatkan detail kebijakan yang sangat penting selama masa kepemimpinan Nazim al-Qudsi (Lesch dan Commins, 2014, hal.277, dan Moubayed, 2006, hal.304).

3. *Syria and the French Mandate: The Politics of Arab Nationalism , 1920-1945* (1987) karya Sejarawan Libanon Philip Shukry Khoury. Buku ini fokus membahas Suriah era kekuasaan Mandat Prancis 1920-1946 M dan perjuangan kemerdekaan Suriah, sehingga tidak ada entri khusus mengenai Nazim al-Qudsi. Khoury hanya sedikit menyinggung Nazim al-Qudsi sebagai seorang pengacara asal Aleppo yang bergabung dengan Blok Nasional. Buku ini juga hanya membahas sejarah Suriah hingga 1946 , berakhirnya era Mandat Prancis, sehingga tidak ada pembahasan mengenai proyek Uni Arab yang terjadi pada 1951 (Khoury , 1987, hal.372).

4. *Ensiklopedi Sejarah Islam* karya Tim Riset dan Studi Islam Mesir (2019) . Pembahasan mengenai Nazim al-Qudsi hanya sedikit,hanya menceritakan kepresidenannya pada 1381-1382 H (1961-1963 M) dan kudeta yang menyebabkan

jatuhnya kekuasaannya pada 1963. Tidak ada pembahasan sedikit pun mengenai proyek Uni Arab ini pada 1951. Hal tersebut menandakan minimnya pembahasan di buku tersebut (Tim Riset dan Studi Islam Mesir, 2019, hal.298).

Penelitian ini, tidak hanya membahas biografi Nazim al-Qudsi atau membahas sepintas perannya sebagaimana buku-buku lain, tetapi juga membahas ide besarnya tersebut. Yang terlupakan atau hanya disinggung sepintas di sumber-sumber lain. Sehingga menambal celah pembahasan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Suriah dalam Perang Arab Israel 1948 dan Kisruh Politik Pasca Perang

Perang Arab Israel 1948, menjadi awal konflik antara Suriah dengan Israel. Perang ini diawali dengan berakhirnya Mandat Inggris di Palestina pada 1947 M. PBB memutuskan membagi Palestina menjadi Negara Arab dan Negara Yahudi. Semua negara Arab , termasuk Suriah, menolak keputusan ini (M.C.Hugo, 2015, hal.130-131).

Pada 14 Mei 1948, para imigran Yahudi di Palestina yang telah memiliki kelompok-kelompok bersenjata, seperti Haganah, Irgun, dan Lehi, memproklamasikan berdirinya Negara Israel. Berdirinya negara Israel ini terjadi setelah melakukan pembantaian besar-besaran terhadap Warga Arab Palestina di sejumlah wilayah Palestina, mulai dari Balad al-Shaykh, Yerusalem, Ramla, Acre, Abu Shusha, Safed, dan sekitarnya sejak 11 Desember 1947-14 Mei 1948 M, yang dikenang dalam sejarah sebagai Tragedi Nakba (Masalha,2012, hal.85 dan M.C.Hugo, 2015, hal.131).

Tindakan tersebut, memicu negara-negara Arab untuk melakukan langkah serius memerangi entintas baru tersebut. Sejumlah negara Arab, seperti Yordania, Irak, dan Mesir , Libanon, serta Suriah bergerak untuk memerangi Israel. Hari yang sama dengan hari berdirinya Negara Israel pada 14 Mei 1948, Pasukan Suriah menginvasi Israel dengan pasukan infantri dan sejumlah kendaraan lapis baja. Sasaran serangan adalah Desa Tzemah yang dikuasai Israel . Desa itu direbut Pasukan Suriah pada 18 Mei , namun mereka mengalami kekalahan beberapa hari kemudian dalam Pertempuran Deganias yang mengakibatkan mereka meninggalkan desa itu . Pada 10 Juni, Pasukan Suriah memenangkan Pertempuran Mishmar Ha Yarden. Pasukan Suriah melakukan serangan ke beberapa pemukiman Israel yang tak terlindung dan mengambil posisi bertahan (Al-Aref, dkk, 2011, hal.12-13).

Selain pasukan reguler, Suriah juga memiliki milisi *Arab Liberation Army* (ALA) yang dipimpin Fawzi al-Qawuqji, seorang veteran Revolusi besar Suriah 1925-1927, yang pada 1925, memimpin perlawanan terhadap Mandat Prancis di Hama. Jumlahnya sekitar 6000 sukarelawan, sebagian besar berasal dari Suriah . Pasukan ALA sudah lebih dahulu memerangi Israel sebelum masuknya pasukan reguler. Pada 20 Januari 1948, 400 milisi ALA dibawah Adib al-Shishakli menyerang pemukiman Israel Yechiam. 11 Juni 1948, sehari setelah kemenangan Suriah di Pertempuran Mishmar, Fawzi al-Qawuqji memimpin ALA bertempur melawan Israel di Galilea (Parsons, 2007, 33 dan 37, Al-Aref, dkk, 2011, hal.4 dan 11).

Sayangnya, perang ini tidak membawa hasil yang memuaskan bagi Suriah. Pasukan Suriah hanya berhasil menguasai sebagian kecil pemukiman Israel di sekitar Laut Galilea. Hanya 66, 5 KM dari Tanah Palestina. Presiden Quwatli mengurangi jumlah pasukan dalam pertempuran itu, dari 30.000 menjadi 6000-7000 prajurit menurut perhitungan MC.Hugo. Pasukan juga dihalangi untuk mendapat senjata baru hingga dipastikan loyalitasnya pada Quwatli. Korupsi dan inkompetensi juga merajarela di kalangan para perwira (MC.Hugo, 2015. hal.132-134).

Alih-alih membebaskan Palestina, Perang Arab Israel 1948 justru menyeret Suriah ke dalam era kekisruhan. Para politikus menghina para tentara yang kalah perang karena ketidaklengkapan peralatan dan suplai. Presiden Quwatli menangkap seorang perwira yang dekat dengan Kolonel Husni al-Zaim karena terlibat skandal lemak masak berkualitas rendah untuk suplai para tentara. Akhirnya, pada 30 Maret 1949, militer dibawah komando Husni al-Zaim menduduki Damaskus dan menahan Presiden Quwatli serta mengirimnya ke pengasingan. Zaim kemudian menobatkan diri sebagai kepala negara (MC.Hugo, 2015, hal.134-135).

Kolonel Husni al-Zaim, meminta Nazim al-Qudsi, yang saat itu menjadi anggota Parlemen Suriah , untuk membentuk pemerintahan. Ia menolak, dengan alasan Quwatli, dengan segala kesalahannya, adalah presiden yang terpilih sedangkan Zaim , menurutnya telah mengambil alih kekuasaan secara ilegal. Zaim yang tidak terima, memenjarakan Nazim (Moubayed, 2006, hal.305).

Peristiwa ini, dicatat Nazim al-Qudsi dalam catatan pribadinya yang membahas persahabatannya dengan Al-Khikiya, *Handwritten Eulogy draft of Rushdi al-Khikiya,* yang ditulis pada 1988. Saat itu, parlemen berkumpul di Hotel Sharqia. Rushdi al-Khikiya yang merupakan salah satu anggota parlemen mengeluarkan s*tatement* tegas

yang menentang kudeta Al-Zaim. Militer dibawah kendali Al-Zaim langsung membubarkan parlemen. Zaim mendapat dukungan dari Partai Nasional dan Partai Rakyat, sementara Nazim dan Al-Khikiya mengungsi ke Beirut (Qudsi, 1988).

Tak lama kemudian, mereka berdua kembali ke Aleppo. Presiden Al-Zaim memutukan melakukan referendum agar resmi terpilih menjadi presiden serta meminta Nazim dan Al-Khikiya pergi ke tempat pemungutan suara dengan ancaman tahanan rumah jika membangkang. Nazim dan Al-Khikiya menolak, sehingga Presiden Zaim menahan mereka sebagai tahanan rumah (Qudsi, 1988). Selama masa kekuasaannya, Zaim juga membubarkan partai yang didirikan Nazim, yaitu Partai Rakyat (Moubayed, 2006, hal.305).

Kekuasaan Al-Zaim tidak berdiri diatas fondasi yang kuat. Dengan cepat, kekuasaan ini runtuh, disusul dua kudeta militer di tahun yang sama . Kudeta pertama, terjadi pada 14 Agustus 1949, yang dipimpin oleh Jenderal Sami al-Hinnawi, sekutu lama partai rakyat dan Kerajaan Hasyimiyah Irak. Jurnalis *The New York Times*, Albion Rosspecial yang meliput kudeta ini, melaporkan Al-Zaim dibunuh di rumahnya bersama Perdana Menteri Muhsin al-Barazi oleh sekelompok pemberontak yang dipimpin Kapten Fawzi Selu (Moubayed, 2006, hal.305 dan Rosspecial, 1949).

Hinnawi menjadi kepala negara , menempatkan Hashim Alatassi sebagai perdana menteri, Nazim al-Qudsi sebagai menteri luar negeri dan Rushdi al-Khikiya sebagai menteri dalam negeri. Posisi lainnya dibagi-bagikan pada anggota Partai Rakyat. Selama masa kepemimpinan singkat Hinnawi, Nazim berupaya melanjutkan proyeknya menyatukan Suriah dan Irak melalui komunikasi dengan putra mahkota Irak, Pangeran Abdullah. Penyatuan ini direncanakan berbentuk negara federal, dengan Suriah dan Irak bekerjasama dalam bidang militer, sosial, ekonomi, budaya, dan politik (Moubayed, 2006, hal.305).

Kondisi itu, tidak berlangsung lama. Pada 19 Desember 1949, lagi-lagi terjadi kudeta yang dipimpin Kolonel Adib al-Shishakli, mantan komandan *Arab Liberation Army*. Dalam waktu singkat, Al-Shishakli dan pasukannya merebut Damaskus dan mengakhiri kekuasaan Hinnawi. Kudeta ini tidak menempatkan Al-Shishakli di kursi kepresidenan, karena pada 24 Desember 1949 M, diadakan pemilihan umum dan yang terpilih sebagai Presiden Suriah adalah Hashim Alatassi. Namun menjadikan Al-Shishakli sebagai orang yang memiliki pengaruh kuat dalam pemerintahan (Anderson, 1971, hal.41 dan Moubayed, 2006, hal.305-306).

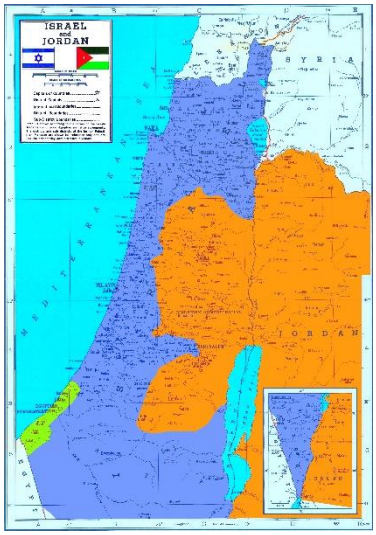
Presiden Hashim Alatassi , pada 3 Juni 1950 M, mengeluarkan dekrit yang mengangkat Nazim al-Qudsi sebagai perdana menteri dan memerintahkannya membentuk pemerintahan. Pemerintahan baru mulai dibentuk pada 3 Juni, dimulai dengan langkah Nazim menyingkirkan para ekstremis dan menunjuk pejabat baru. Salah satu yang ditunjuk adalah Kapten Fawzi Selu sebagai menteri pertahanan. Selu, adalah tangan kanan dari Kolonel Adib al-Shishakli (Alatassi, 1950, dan Moubayed, 2006, hal.306).

Pengajuan Proyek Uni Arab 1951 Oleh Nazim al-Qudsi

Sejak lama, keberadaan Negara Israel yang berdiri diatas Tanah Palestina terjajah telah menjadi keresahan tersendiri bagi Nazim al-Qudsi, bahkan menganggap pihak-pihak yang mendukung berdirinya Negara Israel sebagai "biang kerok" atas masalah ketidakstabilan Suriah di awal kemerdekaannya . Hal itu, ia tulis sendiri dalam catatan pribadinya tentang Rushdi al-Khikiya, saat menceritakan kemerdekaan Suriah 17 April 1946:

"Beberapa bulan setelah Suriah memperoleh kemerdekaannya, kekuatan asing mulai bekerja dan bersekongkol untuk melemahkan negara tersebut sebagai persiapan untuk pembentukan Israel" (Qudsi, 1988).

Pada 1951, masa kepemimpinan Nazim Al-Qudsi sebagai perdana menteri , kondisi Palestina terbagi diantara Yordania dan Israel. Yordania menguasai wilayah tepi barat dan Yerusalem timur, sedangkan Israel menguasai wilayah pesisir dan Yerusalem barat. Mesir, menguasai Gaza.



Gambar 2: Peta kekuasaan di Palestina 1950-an. Wilayah kekuasaan Israel ditandai dengan warna biru, Yordania berwarna oranye, dan Mesir dengan warna hijau. Sumber gambar: Detailed Map of Israel and Jordan (1950) by WogofJog on DeviantArt, diakses pada 16 September 2026, 11: 05 WIB.

Kondisi, ini menimbulkan penderitaan bagi Rakyat Palestina. Di wilayah-wilayah yang dikuasai Israel, terjadi penggantian nama desa-desa Arab dan penghapusan memori kolektif Palestina. Tidak hanya diganti namanya, penghancuran juga terjadi . Setelah berdirinya negara pendudukan Israel pada 1948 M, sejumlah desa di Palestina yang memiliki nama Arab, diubah Pendudukan Israel menjadi berbahasa Ibrani. Sebagai contoh, Desa Az-Zeeb. Setelah 1948, desa ini dihancurkan dan namanya diganti menjadi Gesher Hazhiv. Juga Desa Ayn Karim di Yerusalem, yang dikosongkan setelah 1948 dan namanya diganti menjadi Ein Kerem (Masalha, 2012, hal.104-110).

Di wilayah pendudukan Yordania, terjadi juga masalah. Pada 1950 M, Raja Yordania, Abdullah I menetapkan Tepi Barat sebagai wilayah Yordania. Banyak penduduk lokal Palestina tidak menerima aneksasi ini, dikarenakan mereka menginginkan sebuah negara Palestina yang merdeka. Pada 1951, ia akhirnya dibunuh seorang Nasionalis Palestina di Yerusalem (Shoup, 2007, hal.22 dan Britannica Editors, tanpa tahun).

Hal tersebut, membuat kondisi Palestina terpecah diantara 3 pendudukan dan lemah. Padahal di dalamnya, ada Masjid al-Aqsa yang menjadi salah satu tempat suci bagi Umat Islam, tepatnya kiblat pertama Umat Islam . Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, sahabat Al-Barra berkata:

“ Kami shalat bersama Nabi Muhammad Shallahu Alaihi Wasallam menghadap Baitul Maqdis (nama lain Masjid al-Aqsha) *16 atau 17 bulan, sebelum kemudian mengubah arah menghadap kiblat* (Kabah) “. Hadits ini, merupakan bukti posisi Masjid al-Aqsha sebagai kiblat pertama Umat Islam (Nassar, 2020, hal.4-5).

Penderitaan juga dirasakan oleh akar rumput rakyat Palestina, yaitu penduduk desa. Seperti penyair Palestina Mahmoud Darwish (1941-2008). Ia lahir di Desa Al-Birwa, sebelah timur Acre, Palestina. Selama Perang Arab Israel 1948, keluarganya mengungsi ke Libanon dan 1949 , mereka kembali ke Acre , menemukan rumah mereka telah dihancurkan. Kemudian mereka tinggal di Desa Deir al-Assad, 6 mil di timur Desa Al-Birwa. Pendudukan Israel menganggap mereka sebagai “penyusup” atau “ penduduk ilegal”. Yang artinya, secara hukum, Israel dapat mendeportasi mereka jika tertangkap (Mor, 2022, hal.20-21).

Semua masalah ini, menggerakkan hati Nazim. Kini, ia memiliki posisi sebagai Perdana Menteri Suriah, salah satu negara yang bertetangga dengan Palestina . Pada 26 Januari 1951, Nazim al-Qudsi menghadiri pertemuan Liga Arab di Kairo, Mesir , mewakili Suriah. Dalam pertemuan itu, ia mengajukan proyek penyatuan negeri-negeri Arab menjadi satu negara untuk melawan Zionis Israel. *The New York Times* , melaporkan , dalam pertemuan itu, Nazim al-Qudsi tetap menyelesaikan presentasi proyeknya, meski ada saran agar ia menahan diri, tidak melanjutkan hal tersebut (Moubayed, 206, hal.305 dan The New York Times, 1951, hal.4).

Proyek Nazim bukan main main. Dalam proposalnya tentang proyek ini, *Arab Federal Union Project,* Nazim menuliskan, bahwa negara-negara yang akan disatukannya, meliputi Saudi Arabia, Irak , Libanon, Mesir, Yordania, dan Yaman. Penyatuan yang dimaksud Nazim, adalah sebuah aliansi yang bisa berbentuk konfederasi atau negara persatuan . Tidak hanya untuk melawan ancaman Israel, tetapi juga untuk menyatukan politik luar negeri dan pertahanan negara-negara tersebut (Qudsi, 1951, hal.1-2).

Menurut Nazim, proyek ini bukan proyek penyatuan Suriah dan Irak, sebagaimana dikutip *The New York Times,* seperti yang ia lakukan sebelumnya, maupun proyek *Greater Syria.* Yaitu proyek yang dilakukan Raja Abdullah I dari Yordania. Proyek ini, merupakan proyek penyatuan seluruh negara di kawasan Syam/Levant menjadi satu negara: baik dalam bentuk negara persatuan , ataupun satu federasi yang

memayungi Yordania, Suriah, Libanon, dan Palestina (Qudsi, dikutip dalam The New York Times, 1951, hal.2, Fawwaz dan Al-Afef, 2017, hal.287).

Nilai Historis-Strategis Proyek Uni Arab Nazim al-Qudsi 1951

Proyek penyatuan kawasan negara-negara di Timur Tengah untuk menghadapi penjajah yang bersarang di Palestina, bukanlah hal baru. Proyek ini, telah dilakukan oleh para pemimpin terdahulu, seperti Nuruddin Mahmud , penguasa Dinasti Zangi Suriah (memerintah 1146-1174) dan Shalahuddin al-Ayyubi, pendiri Dinasti Ayyubi (memerintah 1174-1193).

Nuruddin Zangi , yang merupakan penguasa Dinasti Zangi Suriah, merebut Damaskus pada 1154 M dari seorang penerus Dinasti Tughtagin, yaitu Mujiruddin Abaq. Sejarawan Ibnu al-Atsir (1160-1232 M) dalam karyanya, *Al-Kamil fil Tarikh,* , mengisahkan Nuruddin berambisi membebaskan Masjid al-Aqsha dari cengkeraman Pasukan Salib dengan membuat mimbar di Aleppo untuk diletakkan di Masjid al-Aqsha jika Yerusalem berhasil dibebaskan oleh Tentara Salib (yang akhirnya diletakkan di Masjid al-Aqsha oleh Shalahuddin al-Ayyubi saat pembebasan Yerusalem 1187) . Ibnu al-Atsir mencatat, wilayah kekuasaan Nuruddin mencapai Mesir, Suriah, Jazirah, dan Mosul. Kota-kota Syam yang dikuasainya, mencakup Damaskus, Hama, Homs, Syaizar, dan Baalbek (Ibn al-Athir, 2016, hal.71 , 222-223, dan 334).

Demikian pula sang pembebas Yerusalem, Shalahuddin al-Ayyubi. Sejarawan abad ke 13 M, dalam kamus biografinya, *Wafayat al-Ayan,* menyebutkan, Shalahuddin al-Ayyubi, setahun setelah wafatnya Nuruddin pada 1174, tepatnya pada 1175 M, dimana saat itu, ia adalah penguasa Mesir bawahan Dinasti Zangi, sementara Dinasti Zangi di Suriah terpecah di Suriah dan Irak: Saifuddin Ghazi, cucu Imaduddin Zangi (pendiri Dinasti Zangi) menguasai Mosul, Damaskus , pusat Dinasti Zangi di Suriah dikuasai Salih Ismail, putra Nuruddin, dan Aleppo dikuasai Ali ibn Daya. Maka, Shalahuddin bergerak terlebih dahulu untuk merebut kota-kota Suriah : Damaskus, Hama, Homs, dan Aleppo sebelum bergerak untuk membebaskan Yerusalem (Ibn Khallikan, 1983, hal.504-506).

Penyatuan kawasan Timur Tengah sebagai langkah awal membebaskan Palestina dari pendudukan asing, memiliki nilai strategis tersendiri, yaitu menyatukan kekuatan militer dari segenap kawasan untuk melawan pasukan pendudukan. Dalam skala militer, hal ini pernah dicoba pada *Arab Liberation Army* saat Perang Arab Israel 1948. Meski sebagian besar sukarelawan dalam milisi ini berkebangsaan Suriah, namun juga memiliki

prajurit dari kawasan Timur Tengah lainnya. Jumlah pasukan ini pada Perang Arab Israel 1948, mencapai 2.500 Tentara Suriah, 2.500 Tentara Irak, 500 Tentara Libanon, dan 150 Pasukan Muslim Yugoslavia (Balance, tanpa tahun, 83-84 dan Al-Aref, dkk, 2011, hal.11).

Jika penyatuan dalam *Arab Liberation Army* terbatas pada skala militer, maka penyatuan yang dilakukan Nazim memiliki lingkup lebih luas: penyatuan geografis negara-negara Arab menjadi satu pemerintahan . Hal yang dulu pernah dilakukan oleh Nuruddin, lalu dilanjutkan Shalahuddin serta terbukti mampu menghasilkan pembebasan Palestina dari cengkeraman Pasukan Salib pada 1187. Masalahnya, sepanjang 1951-1954, sebagaimana kita lihat nantinya, Suriah terus menerus dirundung ketidakstabilan di internal pemerintahannya, sebagaimana kita lihat nantinya.

Kudeta Al-Shishakli 1951 dan Jatuhnya Kestabilan Politik di Suriah

Masa pemerintahan Nazim al-Qudsi sebagai perdana menteri tidak bertahan lama. Pada 27 Maret 1951, ia mengundurkan diri dari kursi perdana menteri setelah kabinet yang ia pimpin tidak bersatu. Dan , pada 1 Oktober 1951, ia terpilih menjadi Ketua Parlemen Suriah (Moubayed, 2006, hal.306).

Tak lama setelah itu, pada 10 November 1951, Kolonel Adib al-Shishakli melakukan kudeta kedua dan mengambil alih kekuasaan. Al-Shishakli memerintah secara diktator. Nazim serta para pemimpin Partai Rakyat ditahan oleh Al-Shishakli dengan tuduhan mereka hendak mengubah Suriah menjadi kerajaan yang loyal pada Irak. Al-Shishakli memerintah secara diktator. Ia menghapus pengadilan tinggi Suriah, menggantinya dengan birokrat yang dikontrol rezim. Sementara itu, Kapten Fawzi Selu ditunjuk sebagai kepala negara (Anderson, 1971, hal.41-42, dan Moubayed, 2006, hal.306). Posisi Fawzi Selu, tidak lebih dari sekadar boneka yang dikendalikan oleh Adib al-Shishakli sebagai penguasa *de facto* (Moubayed, 2006, hal.612).

Meski belum resmi menjadi kepala negara, Al-Shishakli kini memegang kekuasaan sebenarnya. Hanya dua tahun kemudian, pada 1953 M, dalam refrendum nasional, Adib Al-Shishakli terpilih menjadi presiden dan perdana menteri sekaligus, yang semakin memperkuat posisinya (Anderson, 1971, hal.45).

Al-Shishakli juga berupaya menyingkirkan Kaum Syiah Alawi dan Druze dan membuat pemerintahan yang sentralistik. Hal itu ditentang Pemimpin Druze , Sultan al-Atrash. Al-Shishakli memerintahkan penahanan Atrash. Konfrontasi terjadi antara

pemerintahan Al-Shishakli dengan Komunitas Druze dan menelan banyak korban. Di tahun 1953 itu pula, Al-Shishakli memecat banyak perwira militer dari kelompok minoritas Suriah:Kurdi, Sirkasia, Syiah Alawi, dan Kristen . Militer Suriah, juga di Arabisasi oleh Al-Shishakli (Munnich, 2017, hal.10, Mamoun, 2023, 34-36).

Tentu saja, kebijakan Al-Shishakli tersebut menimbulkan protes. Pada 1954 M, pecah perang saudara singkat yang menggulingkan pemerintahan Adib al-Shishakli. *The New York Times*, memberitakan tanggal 25 Februari 1954 M, Pasukan Suriah di Aleppo , dibawah pimpinan Kapten Mustafa Hamdoun melakukan serangan ke wilayah utara dan berhasil menguasai Homs, Hama, Latakia, dan Deir Ezzor. Malamnya, Al-Shishakli kabur dari Suriah dan berupaya lari ke Riyadh , ibukota Saudi Arabia (The New York Times, 1954, hal.2-3).

Kepala Parlemen Suriah era Adib al-Shishakli, Mamoun al-Kuzbari, dalam memoarnya, menceritakan pembelotan besar-besaran dilakukan Pasukan Suriah yang berada di wilayah utara, termasuk Latakia dan Deir Ezzor ke pihak pemberontak (Al-Kuzbari, tanpa tahun, hal.3) . Terlebih lagi, Kapten Mustafa Hamdoun menangkap komandan Aleppo yang mendukung Adib al-Shishakli, Omar Khan Tamer. Sehingga tidak ada perlawanan berarti dari utara (The New York Times, 1954, hal.2).

Setelah tergulingnya Al-Shishakli pada 1954 , Presiden Hashim Alatassi kembali menjabat. Kekuasannya berakhir pada 1955 M, saat Presiden Syukri al-Quwatli kembali dipilih untuk menjabat setelah pemilihan umum (Munnich, 2017, hal.11 dan Britannica Editors, tanpa tahun).

Adapun Nazim al-Qudsi, penggagas proyek tersebut, telah terpilih menjadi ketua parlemen pada 1954 M. Kondisi Suriah terpecah, sebagian warga negaranya menginginkan persatuan dengan Irak, sebagian lainnya menginginkan persatuan dengan Mesir yang ketika itu dipimpin Presiden Gamal Abdel Nasser. Kepala Parlemen Nazim al-Qudsi, justru mempromosikan pandangan pro Inggris dan pro Amerika Serikat, saat sebagian besar Rakyat Suriah bersimpati pada Uni Soviet (Moubayed, 2006, hal.306).

Pada 1957 M, Nazim al-Qudsi mengundurkan diri dari jabatannya dan jabatannya digantikan oleh Akram Hawrani, seorang pemimpin Sosialis pro Nasser. Setahun kemudian, 1958 M, Suriah bersatu dengan Mesir yang dipimpin Presiden Nasser dengan nama UAR (*United Arab Republic*). Nazim pensiun dan mengundurkan diri ke kota kelahirannya, Aleppo (Moubayed, 2006, hal.306).

Masa persatuan yang singkat itu, berakhir pada 28 September 1961 M. Pemberontakan lainnya , yang memisahkan kembali Suriah dengan Mesir, terjadi pada tahun itu. Pelakunya adalah faksi-faksi militer Suriah yang tergabung dalam *Supreme Arab Revolutionary Command of Armed Forces* . Unit-unit yang melakukan kudeta antara lain pasukan lapis baja dan pasukan keamanan gurun (*Quwat al-Badiya*) dengan dikoordinir Letnan Kolonel Abdul Karim al-Nahlawi. Setelah konfrontasi singkat dengan Pasukan Mesir, Suriah meraih kembali kemerdekaannya. Kudeta ini didukung oleh Arab Saudi dan Yordania (Sorby, 2009, hal.148-152).

Nazim al-Qudsi terpilih menjadi Presiden Suriah pada 12 Desember 1961 M. Pada masanya, pecah dua kudeta. Kudeta pertama terjadi pada 28 Maret 1962 M, dimana Al-Nahlawi dan faksinya menahan Presiden Nazim al-Qudsi dan Perdana Menteri Maruf al-Dawalibi dengan tuduhan penyalahgunaan kekuasaan. Pada akhirnya, kudeta ini berhasil diatasi faksi militer pro pemerintah yang dipimpin kepala staf militer Abd Karim Zahr aldin. Mengembalikan Nazim al-Qudsi ke kursi kepresidenan (Moubayed, 2006, hal.307).

Kekuasaan Presiden Nazim berakhir pada 8 Maret 1963 M, setelah kudeta gabungan faksi militer Partai Baath dan faksi militer pro Nasser yang dipimpin Mayor Ziad al-Hariri. Kudeta itu dikoordinir Komite militer Partai Baath. Presiden Nazim akhirnya menghabiskan masa pensiunnya dengan berpindah-pindah antara Eropa, Libanon, dan Yordania setelah para pemberontak melarangnya untuk kembali ke Suriah. Ia wafat pada 1998 M, dalam pengasingan di Yordania (Sorby, 2009, hal.167 dan Moubayed, 2006, hal.307).

KESIMPULAN

Suatu negara yang ingin melakukan proyek makro dengan skala internasional, harus dilandasi dengan kondisi politik dalam negeri yang stabil. Kegagalan proyek Uni Arab yang digagas Suriah pada 1951, terjadi karena faktor tidak stabilnya kondisi dalam negeri.

Kurangnya kekompakan dalam internal pemerintahan, ditambah adanya kudeta militer silih berganti menyebabkan gagalnya proyek internasional berskala besar tersebut. Kudeta yang terus menerus itu , mengikis kestabilan pemerintahan dan menyebabkan perang saudara internal, konflik antar faksi militer, maupun persaingan antar perwira untuk mendominasi pemerintahan. Proyek yang seharusnya dapat

menyatukan negara-negara Arab untuk membebaskan Palestina dalam satu panji, menemui kegagalan karena tidak adanya kestabilan di negara penggagas proyek.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qudsi, Nazim (1951). *Arab Federal Union Proposal* . Presidential Library of DR.Nazem al-Koudsi. Arab Federal Union proposal original copy of Dr. Nazem Koudsi submitted to the Arab League | Presidential Library of Dr. Nazem al-Koudsi

Al-Qudsi, Nazim (1951). *Handwritten Eulogy draft of Rushdi Al-Kikhya.* Presidential Library of DR.Nazem al-Koudsi. Handwritten Eulogy draft of Rushdi Al-Kikhya by Dr. Nazem al-Koudsi, dated in 1988, and never published before | Presidential Library of Dr. Nazem al-Koudsi

Abdil Barr, Yasir (2024). *Izzuddin al-Qassam: Sang Inspirator Pembebasan Palestina,* Sukoharjo: Arafat.

Abu Shaqra, Iyad (tanpa tahun). Biography | Presidential Library of Dr. Nazem al-Koudsi, diakses 5 Oktober 2026, 21: 17 WIB.

Al-Athir, Ibn (2016). *The Chronicle of Ibn al-Athir for the Crusading Period from Al-Kamil fil Tarikh Part 2: The Years 541-589/ 1146-1193 : The Age of Nur al-Din and Saladin* (Diterjemahkan oleh DS.Richards) , New York: Routledge.

Al-Aref, Aref, dkk (2011). *1948-Arab Israeli War*. Tanpa penerbit. (anonymous)

Al-Kuzbari, Mamoun (tanpa tahun). *Memoirs*, Beirut: Mamoun Kuzbari Org.

Alatassi, Hashim (1951). *Official Decree by President Hashem Al-Atassi to Prime Minister Nazem Koudsi To form the Cabinet.* Presidential Library of DR.Nazem al-Koudsi. Official decree by President Hashem Al-Atassi to Prime Minister Nazem Koudsi to form the cabinet. 1950 | Presidential Library of Dr. Nazem al-Koudsi

Abdurrahman, Dudung (2019). *Metodologi Penelitian Sejarah Islam.* Yogyakarta: Ombak.

Al-Fawwaz, A. A., & Al-Afef, A. K. (2017). The Position of Non-Governmental Syrian Powers towards Greater Syrian Plan. *Dirasat: Human & Social Sciences*, 44(2), hal.285-300. researchgate.net

Anderson, Eric A (1971). *The Role of the Military in Syria : The Shishakli Years (1949-1954).* scholarworks.calstate.edu/downloads/2227mq829

Balance, Edgar O (tanpa tahun). *The Arab Israeli War 1948*, London: Faber &Faber Limited.

Britannica Editors (tanpa tahun). Abdullah I | Biography, History, & Assassination | Britannica, diakses 5 Oktober 2026, 21: 56 WIB.

Britannica Editors, tanpa tahun, Hāshim al-ʿAtāsī | Syrian leader, Ba'athist, Arab nationalist | Britannica, diakses 27 September 2026, 21: 02 WIB.

Burke, Peter (2015). *Sejarah dan Teori Sosial* (Diterjemahkan oleh Mestika Zeid, dkk), Jakarta: Obor.

Lesch, David W, dan Commins, David (2014). *Historical Dictionary of Syria*, Toronto: Scarecrow Press.

Hugo, John MC (2015). *Syria: A Recent History,* New York: The New Press.

Halabi, A. (2012). Liminal loyalties: Ottomanism and Palestinian responses to the Turkish war of independence, 1919–22. *Journal of Palestine Studies*, 41(3), 19-37. Liminal Loyalties: Ottomanism and Palestinian Responses to the Turkish War

of Independence, 1919–22 | Journal of Palestine Studies | University of California Press
Khallikan, Ibn (1983). *Kitab Wafayat al-Ayan: Biographical Dictionary Vol.4* (Diterjemahkan oleh B.MacGlukin De Slane), Paris: Oriental Translation Fund Of Great Britain And Ireland.
Khoury, Philip S. (1987). *Syria and the French Mandate: The Politics of Arab Nationalism , 1920-1945*, Princeton: Princeton University Press.
Moubayed, Sami (2006). *Steel & Silk: Men and Women Who Shaped Syria 1900-2000*, Seatle: Cune.
Memories, Syrian (2023). Syrian Independence Day Celebration in 1946 – syrian memories, diakses 5 Oktober 2026, 20: 48 WIB.
Mor, Dalya Cohen (2022). *Mahmoud Darwish : Penyair Palestina dan Kekasih Yahudinya* (Diterjemahkan oleh Mirza Syauqi Futaqi), Yogyakarta: Diva Press.
Masalha, Nur (2012). *The Palestine Nakba: Decolonising History, Narrating the Subaltern, Reclaiming Memory*, London & New York: Zed Books.
Maksudoglu, Mehmed (2023). *The Untold History of Ottoman: Menelusuri Daulah Islamiyah Terbesar di Dunia dan Pemerintahannya* (Diterjemahkan oleh Wisnu Tanggap Prabowo, dkk), Jakarta: Al-Kautsar.
Mamoun, A. (2023). The Conflict between Political Factions of the Syrian Military Establishment, 1954-1958: Coups and Political Pluralism. *Syria Studies*, 15(2). hal.1-66.
Münnich, M. (2017). Syria Past and Present. *Teka Kom Politol: Ol Pan*, hal.7-25.
! Pan_vol_XII_1_k_druk.indd
Nassar, DR.Muraweh Mousa (2020). *40 Hadis : Arbain Al-Maqdasiyah*, Selangor: Aman Palestin.
Parsons, Laila . (2007). Soldiering for Arab Nationalism: Fawzi al-Qawuqji in Palestine. *Journal of Palestine Studies*, 36(4), 33-48. Soldiering for Arab Nationalism: Fawzi al-Qawuqji in Palestine | Journal of Palestine Studies | University of California Press
Rosspecial, Albion (1949). President, Premier of Syria Are Killed in Officers' Coup; Zayim Regime Overthrown by Leaders of Army -- Hard Fight Reported Zayim and Barazi Meet Death in Syrian Coup d'Etat KILLED IN SYRIA - The New York Times, diakses 5 Oktober 2026, 22: 09 WIB.
Sorby, Karol R . (2009). The Separatist Period in Syria, 1961–1963. *Asian and African Studies*, 75, hal.145-168.
Shoup, John. A (2006). *Culture and Customs of Jordan* , London: Greenwood Press.
Tim Riset dan Studi Islam Mesir (2019). *Ensiklopedi Sejarah Islam* (Diterjemahkan oleh M.Taufik, dkk), Jakarta: Al-Kautsar.
Times, The New York (1951). The New York Times: Arab State Is Proposed To Fight 'Zionist Threat' Jan 26 -1951 | Presidential Library of Dr. Nazem al-Koudsi, diakses 5 Oktober 2026,22: 11 WIB.
Times, The New York (1951). The New York Times: Syrian Premier Says Arab Union Idea Concerns All in League, Jan 27- 1951 | Presidential Library of Dr. Nazem al-Koudsi, diakses 5 Oktober 2026, 22: 12 WIB.
Times, The New York (1951). The New York Times – Syrian Army Depose Shishakly – 26 Feb -1954 | Presidential Library of Dr. Nazem al-Koudsi, diakses 5 Oktober 2026, 22: 20 WIB.